



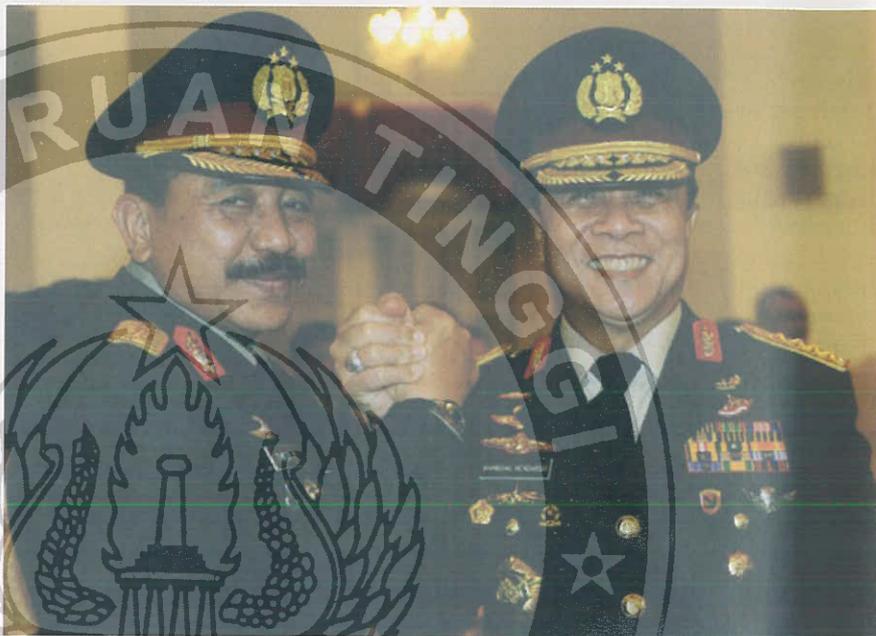
REVITALISASI STRATEGI PENCERAHAN DUA SISI

OLEH:
BOY SALAMUDDIN

MENYAMAKAN TRANSLASI

Revitalisasi, adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan adanya suatu proses, upaya, kegiatan ataupun kondisi tertentu, sebagai contoh forestasi merupakan suatu proses atau upaya untuk menghutankan kembali suatu kawasan yang dinilai telah terjadi deforestasi. Kata revitalisasi ini sering kali diucapkan, dituliskan atau digunakan oleh berbagai kalangan dari pemerintah, bisnis, swasta, lembaga akademis ataupun orang perorangan. Mengacu pada konsep penataan kota, maka revitalisasi dimaknai sebagai upaya untuk men- vital-kan atau menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang mengalami kemunduran/degradasi. Menghidupkan kembali bukan dalam pengertian nostalgia masa lalu, yang mana bentuk, arsitektur, nilai-nilai seni dan jiwa kolonialisme dan fedodalisme diaktualisasikan dalam ujud moderen. Tetapi lebih pada konotasi menjadikannya kembali sebagai suatu ruang, suatu tempat, bangunan atau kawasan yang secara hakiki dapat memberikan ruang hidup dan kehidupan bagi manusia, dengan memperhatikan nilai-nilai historis, empiris, praktis atau utilitasnya..

Revitalisasi dalam konteks bisnis atau korporasi dipahami sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja dan nilai bisnis atau korporasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam kerangka pentahapan waktu atau pencapaian tujuan jangka panjang. Tentu saja dengan memperhatikan aspek komersial dan profitnya. Dalam konteks itu dapat ditelaah satu frase kunci, yaitu



meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik, lebih tinggi, lebih berprestasi, lebih dipercaya atau lebih diandalkan. Atas dasar pertimbangan logis dan mendasar analogi itulah, Kapolri baru Jenderal Pol Drs. Timur Pradopo menetapkan strategi revitalisasi sebagai kebijakan untuk melanjutkan keberhasilan yang sudah diraih oleh Kapolri terdahulu, serta mereduksi atau mengeliminasi berbagai praktek-praktek perpolisian yang tidak sesuai dengan jiwa dan mandat undang-undang nomor 2 tahun 2002 dan grand strategi Polri 2005 – 2025.

AKSELERASI DALAM CATATAN

Nampaknya berkesan sebagai suatu tradisi atau kebiasaan berulang, yang setiap suksesi kepemimpinan Kapolri ditandai dengan penancangan suatu strategi atau kebijakan prioritas. Masyarakat awam, termasuk anggota Polri biasanya akan menanggapi dingin atau biasa-biasa saja, bahkan

lebih naif lagi terucap “ ah itu kan untuk program pencitraan diri atau publisitas belaka “. Kenaifan itu mungkin kita sikapi sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa saja, namun secara filosofis memiliki makna refleksi yang substansial berbasiskan sikap dan cara berpikir empiris subyektif namun kritis. Refleksi itu adalah akumulasi cermatan dan empirik anggota serta masyarakat terhadap fenomena politik pencitraan yang berlangsung. Kita pun sering dibuat teragap-gagap untuk sekedar menghupal atau mengingat-ingat kebijakan atau strategi Kapolri baru, sementara kebijakan atau strategi yang lama masih dilaksanakan secara teragap-gagap. Bahkan para petinggi fungsi utama atau kesatuan kewilayahan harus segera mungkin memahami, mengelaborasi dan mengharmonisasikan dengan program kerja berjalan. Sungguh suatu pekerjaan yang sejujurnya

berkesan parsial reaktif, bahkan pada beberapa kasus dapat multi tafsir atau salah tafsir. Era Kapolri BHD muncul kebijakan aksele rasi, yang ujudnya adalah suatu upaya atau strategi untuk mempercepat proses atau kegiatan-kegiatan pening katan berbagai fasilitas pelayanan Polri terhadap kepentingan publik, penyederhanaan dan transparansi mekanisme dan prosedur rekrutmen calon anggota Polri, peningkatan mekanisme kontrol terhadap proses penyidikan. Kesemuanya diorientasikan kepada peningkatan kepuasan masyarakat/ *public satisfaction* (agar dibaca terpenuhi rasa aman, damai, tertib, selamat dan lancar). Kita berhipotesa bahwa peningkatan kepuasan itu akan mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan mandat Polri yang diterimanya. Setelah dua tahun berselang dan beralihnya renstra membangun kepercayaan kepada membangun jejaring perpolisian masyarakat atau kemitraan (2010 – 2014), maka peralihan ini menyisakan pertanyaan awam, apakah kebijakan akselerasi sudah tercapai. Setidaknya empat jabanar quick wins sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Kapolri BHD pernah beberapa kali di berbagai fora menegaskan bahwa strategi membangun kepercayaan masyarakat tidak berhenti dengan berakhirnya tahun akhir renstra pertama tersebut, tetapi menjadi pondasi untuk dua renstra berikutnya. Maksudnya, bahwa kepercayaan masyarakat harus terus dibangun, dikembangkan, diperluas dan diperkuat, sehingga pada dekade kedepan akan muncul dan berkembang rasa memiliki masyarakat terhadap Polri (*ownershipness*). Kita perlu menelaah secara jujur, obyektif, luas dan menyeluruh, apakah kebijakan dan strategi akselerasi itu justru semakin memperluas dan memperkuat distrust dan mistrust para stake holders.

Layaknya suatu dinamika black box, yang mana elemen masukan awal, proses dan capaian dapat dihimpun sebagai masukan bagi lingkaran keberlanjutan proses selanjutnya. Pertanyaannya seperti apa masukan-masukan itu? Kalau kita mau berpikir sedikit terbuka, jernih, runtut dan menyeluruh, maka akan tergambaran dua sisi profil Polri yang bertolak belakang. Pada satu sisi, Polri adalah institusi yang dicintai, dimiliki



dan diharapkan masyarakat, namun pada sisi sebaliknya terpampang wajah buram Polri yang dicerai oleh segelintir oknum. Banyak sudah masukan-masukan yang terungkap atau diungkapkan atau dikemukakan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Cermin wajah Polri diatas, masukan-masukan, harapan-harapan, dorongan atau dukungan berbagai pihak yang masih “memiliki Polri” menjadi platform dan pondasi yang nyata serta ideal bagi Kapolri untuk mempertimbangkan kebijakan Revitalisasi.

Pemahaman utuh menyeluruh tentang kebijakan dan strategi tersebut harus menjadi tanggung jawab semua pihak di kalangan internal Polri dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Bila hanya Polri saja yang memahami, menginternalisasikan kedalam renstra *partnership building*, maka *ownershipness* atau rasa memiliki Polri hanya dimiliki oleh kalangan Polri (itupun diragukan 100 %), dengan kata lain hanya sepihak dan semu. Sehingga kepada seluruh keluarga besar Polri (Polri aktif, purna, keluarga dan termasuk organisasi putra putri Polri) sangat digantungkan suatu harapan untuk menjadikan Polri sebagai suatu lembaga yang dimiliki, dicintai dan dibanggakan oleh keluarga besar Polri. Demikian juga terhadap masyarakat pemangku kepentingan Polri diharapkan ikut menjadi bagian dari proses bola es untuk menggelindingkan idealisme itu kedalam suatu mekanisme kerja sama

yang bersimbiose mutualistis.

MEREBUT HATI DAN PIKIRAN

Pencanangan tiga strategi Kapolri adalah suatu jawaban strategis, akomodatif, cerdas dan jernih terhadap aspirasi masyarakat. Namun strategi ini harus dibunyikan secara realistis dan faktual (nyata, terukur, dapat dirasakan, menyentuh kepentingan para pelaksana dan masyarakat) serta aktual (sesuai dengan kebutuhan saat ini yang mendasar dan mendesak). Kesemuanya harus berada didalam alur dan koridor menjadikan Polri sebagai institusi yang dimiliki, dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat. Sederhananya adalah bagaimana Polri merebut hati dan pikiran anggotanya terlebih dulu, baru kemudian terhadap masyarakat pemangku kepentingan lainnya. Secara rinci dan sederhana dapat digambarkan sebagai berikut; bahwa strategi penguatan institusional (*institutional strengthening*) dalam bentuk struktur baru sudah disyahkan dan dioperasionalisasikan, berbagai piranti lunak yang bersifat regulatif sedang berproses untuk mengatur ulang dan memfasilitasi hubungan internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal, penataan ulang penempatan personil sedang berproses dan sejatinya harus berbasiskan *the right man on the right job and the right time chance*.

Diatas disebutkan sebagai penguatan institusional, jadi tidak hanya terbatas pada struktur fisik dan formal organisasi Polri, namun



lebih luas lagi menjangkau aspek-aspek kelembagaan, atau yang memungkinkan suatu institusi formal dapat berjalan secara efektif dan optimal. Menyadari akan arti penting aspek-aspek diluar itu, maka penataan ulang kantor dan ruang kerja adalah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan.

Sejauh ini nampaknya kita luput menjadikan kantor sebagai ruang dan sarana kerja yang nyaman manusiawi. Tengok saja keterbatasan kamar mandi dan kakus, kalaupun tersedia, namun aspek kebersihan, kenyamanan dan kesehatannya terabaikan. Anggota atau staf sering mengeluhkan kesulitan untuk mandi sehabis berolahraga atau kerja lembur.

Kondisi fasilitas yang tidak terawat, terpelihara, terabaikan merupakan ujud gambaran ketidak-pedulian atau ketiadaan rasa memiliki "kita", padahal kantor Polri adalah ruang interaksi sosial dan pelayanan publik. Masyarakat yang kebetulan sedang berada di kantor polisi akan serta mencerna secara sederhana bahwa "bagaimana Polri mau peduli dengan masyarakat, kalau Polri sendiri tidak peduli dengan anggotanya".

Polri pun dihadapkan pada isu klasik keterbatasan perumahan dinas bagi anggota Polri dan keluarganya. Berbagai fasilitas penunjang kesejahteraan di lingkungan perumahan Polri pun dalam kondisi

yang memprihatinkan. Strategi penyediaan perumahan melalui kredit, nampaknya belum berjalan optimal dan efektif. Disinilah sebenarnya isu hakiki dan peluang bagi para pimpinan Polri untuk menjadikan revitalisasi sebagai momentum untuk memanusiaikan anggota dan keluarga Polri.

Pada beberapa lembaga kepolisian di lingkungan masyarakat "maju", ketersediaan kamar mandi dan WC yang manusiawi adalah kebutuhan utama yang mendasar. Demikian juga gedung atau ruangan yang bermulti fungsi.

Secara ideal gedung tersebut dapat berfungsi sebagai ruang makan anggota, yang sekaligus sebagai rendezvous antara pejabat Polri dengan kliennya, ruang rekreasi atau relaksasi anggota atau staf Polri. Fasilitas ini dapat digunakan juga sebagai cafe, sarana olah raga, bioskop mini/ theater, perpustakaan bahkan ruang kontemplasi.

Keberadaan sarana ini selain menumbuhkan rasa kebersamaan, kepemilikan, kesetaraan, namun juga menunjukkan keterbukaan / transparansi interaksi sosial antara pejabat Polri dengan masyarakat. Strategi ini akan menimbulkan hasil yang multi efek atau implikasi ganda. Polri sebagai institusi akan diperlakukan oleh keluarga besar Polri sebagai bagian dari hidup dan

kehidupannya. Dalam kalkulasi sederhana, setidaknya 50 % hidup dan kehidupan anggota Polri dan PNSnya diabdikan di lingkungan kerja. Fasilitas kantor dan ruang kerja yang manusiawi dengan sendirinya akan menunjang kinerja individual dan Polri secara kelembagaan.

Soliditas dan solidaritas korps berulang kali menjadi isu strategis di lingkungan Polri. Apapun alasan atau argumentasinya, fenomena itu muncul, berkembang dan menjadi keprihatinan bersama. Bahkan pernah muncul dalam bentuk terbuka yang agak progresif, sehingga memunculkan polarisasi kelompok.

Rivalitas dan kompetisi yang diluar sistem, memunculkan friksi dan konflik internal ataupun antara Polri dengan kelompok pemangku kepentingan. Situasi ini menjadi tidak sehat dan kondusif, bahkan kontraproduktif. Untuk mereduksi atau setidaknya meminimalisasi fenomena itu, tiada lain kata kuncinya adalah membuka luas kesempatan dan persyaratan yang sama bagi siapa saja. Mekanisme vacant post atau job yang ditawarkan / diiklankan akan membuka tabir bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Siapapun yang memenuhi syarat dan kriteria yang ada, akan mengisi jabatan tersebut sesuai dengan profil pekerjaan dan kompetensi yang ada. Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan itu akan menjadi ikhlas, legowo dan bahkan mendukung gerak langkah rivalnya tersebut. Kapolri sudah menegaskan dalam video conference pertamanya, bahwa beliau tidak akan menggunakan hak prerogatif dalam pembinaan karir personil, sebaliknya menyerahkan pada mekanisme wanjak yang ada.

Kebijakan ini mengindikasikan suatu signal yang jelas dan kuat, bahwa revitalisasi hanya akan berhasil efektif manakala manusia Polri sebagai unsur pertama dan utama dalam organisasi dan sistem manajemen Polri

ditempatkan sebagai elemen yang vital dalam menggerakkan organisasi dan menejemen didalamnya. Kebijakan ini memberi peluang dan kesempatan bagi siapa saja yang menurut sistem penilaian internal memiliki potensi yang baik, berprestasi, berdedikasi, berkomitmen dan menunjukkan kinerja yang tinggi.

Polri memang lembaga atau organisasi formal yang sipil, yang dalam beberapa aspek tertentu, berbeda dengan organisasi formal lainnya, seperti TNI. Polri diberikan mandat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman publik didalam suatu ruang interaksi dan komunikasi yang terbuka, transparan, manusiawi dan nyaman tentunya.

Paradigma polisi sipil memang mengharuskan anggota Polri dan segenap PNS Polri bersikap laku layaknya masyarakat madani (protagonis, menghormati supremasi hukum, mengapresiasi HAM, menjalankan mekanisme punishment and reward yang seimbang serta adanya mekanisme kontrol internal dan eksternal yang efektif). Kehendak zaman ini tidak seharusnya membuat Polri menjadi "telanjang" terhadap potensi ancaman terhadap keberadaan dan kepentingan personil Polri dan lingkungan kerjanya.

Prosedur pengamanan pada perimeter terluar masih terabaikan, padahal itu merupakan titik awal yang sangat lemah, terbuka, terlihat langsung sistem proteksi diri dan lingkungannya. Petugas-petugas terdepan masih bertindak formalitas terhadap siapa saja yang memasuki perimeter lingkungan kerja Polri. Detektor yang ada hanya sebagai pelengkap kehadiran fungsi preventif disitu, padahal ancaman retaliasi, sabotase dan penetrasi "musuh" sangat potensial besar.

Para pejabat fungsi pengawasan atau "atasan" yang ada sudah kehilangan sensitifitas dan kepedulian terhadap potensi ancaman itu. Disatu sisi Polri menjadi pembina fungsi kepolisian dan keamanan dalam negeri terhadap satuan-satuan pengamanan dan masyarakat umum tentang upaya pengamanan kepolisian swakarsa.

Momentum revitalisasi hendaknya dijadikan driving / triggering factor untuk pencerahan paradigma / mindset dan culture set kita untuk meninggalkan cara pandang dan cara kerja yang "ceroboh" itu. Polri

harus lebih sensitif mencermati setiap dinamika sosial dan lingkungan strategis yang terjadi serta menindak-lanjutnya secara sistematis (terarah, terukur, terkontrol dan terkoordinasi). Pemberdayaan jenjang pengawasan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi keamanan merupakan pilihan yang bijak dan tidak dapat dihindari. Keberhasilan penerapan sistem pengamanan internal ini akan mencerminkan kembali segenap pemangku kepentingan Polri, yang pada gilirannya akan mendorong sikap memiliki, mencintai dan membanggakan masyarakat terhadap Polri.

Terobosan yang kreatif (creative breakthrough) menjadi kebijakan kedua, dengan asumsi kebijakan pertama terimplementasi dengan hasil menguatnya kembali ownershipness atau melu handarbeni para pemangku kepentingan terhadap Polri. Masalah-masalah dan isu-isu yang dihadapi Polri sejatinya adalah bersumber dari dinamika sosial, yang spektrumnya luas dan beragam. Merentang dari urusan yang sederhana sampai dengan masalah rumit dan menyita perhatian dan energi Polri. Pengalaman menunjukan bahwa pola-pola tindakan kepolisian yang rutinitas, berulang dan tetap sering memberikan hasil yang tidak efektif, optimal dan tidak mampu menuntaskan akar masalah. Bahkan

kerap kali mendorong munculnya masalah baru yang semakin rumit cara penyelesaiannya. Konsep dan cara berpikir kreatif, inovatif, dinamis, akomodatif dan progresif merupakan pilihan bijak dan cerdas yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.

Pilihan atau opsi alternatif sangat mungkin dirumuskan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan segenap pemangku kepentingan. Hal ini harus dilakukan karena memang nyatanya Polri menghadapi keterbatasan sumber daya organisasi. Terobosan yang kreatif jangan sampai keluar dari koridor norma-norma yang ada. Kesemuanya harus tetap terbuka, transparan, terkendali, terukur dan tercermati.

Beberapa pemikiran alternatif pada penguatan kelembagaan sebagaimana diuraikan diatas ada salah contoh konsep alternatif atau cara pandang yang kreatif, namun tetap realistis sebagai upaya solutif terhadap fenomena mengaburnya rasa memiliki, mencintai dan bangga para pemangku kepentingan terhadap keberadaan dan kiprah Polri.

Semoga kita mampu menjadikan diri kita sebagai pemimpin bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan keluarga yang kita cintai.

